



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon. 3500901; Fax. 3521967**

NOTULEN RAPAT

TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

- Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Desember 2018
- Waktu : 9.30 s/d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Lantai 1
Gedung Kemenko Perekonomian
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta
- Agenda : 1. Persetujuan Final Laporan EITI 2016
2. Pembahasan TOR Laporan ke-2 Transparansi Commodity Trading
- Peserta Rapat
- Pemerintah : 1. Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri:
Ahmad Bastian Halim, Rosiana Kurniati.
2. Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri:
Thasya Pauline, Bima Putra Bayu P.
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diwakili oleh: Syafriadi, Sigit H.
4. Kementerian ESDM diwakili oleh M. Ali Hanafiah.
5. SKK Migas, diwakili oleh: Bayu Alfadiyanto, Runi Nariswari.
6. Direktorat Jenderal Anggaran, diwakili oleh: Robby Martaputra,
Erman JK.
7. Disperindag Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh: Erwinsyah,
Suyadi
8. DJP, diwakili oleh: Arifin Rosyidi, Jonathan Nainggolan.
9. Direktorat Jenderal Minerba, diwakili Ilham Budi.
- Asosiasi Industri dan Perusahaan Masyarakat Sipil : 1. APBI-ICMA, diwakili oleh Marvin G. Hendra Sinadia
2. PWYP Indonesia, diwakili oleh: Asri Nuraeni.
3. UNY (Utrecht Univ.) diwakili oleh: Yanuardi, Akmilatul Maghfiroh
4. Article 33, diwakili oleh: Ermy Ardhyanti.
5. IPA, diwakili oleh: Marjolijn Wajona
- IA Parker Randall : 1. Ade Ikhwan
2. Dessi Yuliana
3. Nuzulul Haq
4. Suwandi
5. Asrini Wiranti
6. Gemi Ruwanti
7. Irvan Zulfikar
8. Padang W.

Sekretariat EITI : 9. Layla Nurhasannah
10. Fikri Cahyo Wicaksono
1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan
3. Agus Trianto
4. Venta Adrian A.
5. Astari Maharani
6. Doni Erlangga
7. Novianti Sugih
8. Anggi Gartika
9. Hadian

A. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, selaku Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif. Agenda pertemuan ini adalah persetujuan final Laporan EITI 2016 dan Pembahasan TOR laporan ke-2 transparansi commodity trading.

B. Pemaparan

Tim IA menyampaikan hasil draft final laporan EITI 2016 diantaranya:.

1. Kontekstual

- Masukan dari tim pelaksana
 - A. Narasi terkait Gross split
 - B. Isu terkait loss carry forward
 - C. Klarifikasi gambar 20 mengenai pemegang saham BUMN.
 - D. Akuisisi PGN kepada Pertamina
 - E. Perubahan narasi keterbukaan kontrak
 - F. Rekomendasi mengenai kajian lebih lanjut mengenai industri ekstraktif
 - G. Rancangan perubahan PP 23/2010 dan RPP Perpajakan Batubara
 - H. Update narasi kontribusi industri naratif pada lapangan kerja.
- Rekomendasi
 - A. Perlu adanya panduan teknis mengenai penerapan Perpres 13/2018
 - B. Tim pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai aturan yang berlaku
 - C. Diharapkan terdapat kajian lebih lanjut untuk isu yang dianggap strategis pada industri ekstraktif

2. Rekonsiliasi

- Status akhir rekonsiliasi migas dan minerba
- Hasil akhir rekonsiliasi antar masing-masing perusahaan dan instansi migas dan minerba.
- Temuan rekomendasi untuk laporan tahun 2016

C. Pembahasan, Tanggapan dan Masukan

Pak Edi menjelaskan

- Diskusi terkait BO (Beneficial Ownership) akan lebih dimasifkan mulai tahun depan agar mendapat hasil yang lebih maksimal.
- Laporan EITI pada tahun ini sifatnya menyeluruh tetapi tidak mendasar, untuk isu-isu tertentu rekomendasinya dianalisis terpisah di luar laporan secara terpisah.

Dirjen Minerba menanyakan

- Narasi keterbukaan kontrak hal. 116 setelah di-cek ada di ringkasan eksekutif hal. 2 mohon di-cek kembali
- Narasi antara migas dan minerba atas keterbukaan kontrak antara PSC dan kontrak di minerba
- Perlu ditambahkan mengapa belum bisa dibuka di publik yaitu masih belum bisa dibuka di publik karena menyangkut aspek perdataan dari kontrak.

Tim IA menanggapi

- Narasi lengkap terkait keterbukaan kontrak ada di halaman 20 untuk regulasi pengungkapan kontrak dan perijinan.
- Narasi alasan mengenai keterbukaan kontrak yaitu sesuai keputusan KIP ESDM semua kontrak harus terbuka untuk publik, tetapi hingga saat ini semua kontrak belum dapat terbuka kepada publik

API menanyakan

Jika membicarakan terkait gross split hanya mengacu pada Permen 8 bukan Permen 52, padahal ada beberapa hal yang telah diubah pada Permen 52, contohnya pada tabel 7 hal. 28. mohon diperhatikan lebih lanjut.

Tim IA menyampaikan

Untuk pelaporan kontekstual tahun 2016, isi laporan berisi informasi hingga bulan Juni 2018.

DJP menyampaikan

Ada beberapa yang perlu diperhatikan:

- Terkait narasi laporan untuk pajak sudah setuju.
- Status akhir rekonsiliasi minerba untuk PBB hasil persentase 99% perlu diklarifikasi kembali.
- Apakah angka LKPP untuk pertambangan minerba sudah konfirm besaran nilainya, karena laporan tahunan DJP tidak dibagi per sektor tetapi per jenis pajak.
- Rekomendasi agar dalam LO dijelaskan lebih spesifik mengenai PPh badan dan PPh migas karena itu dua hal yang berbeda.
- Dalam LO untuk nomor NOP disampaikan secara detail agar lebih mudah dalam melacak data tersebut.

Tim IA menanggapi

- Terkait persentase perbandingannya yaitu antara selisih akhir dengan data dari pemerintah
- Untuk total penerimaan negara dari PPh pertambangan sektor minerba, angkanya didapat dari TOR EITI 2016 yang disusun oleh sekretariat EITI.
- Untuk permintaan data jenis pajak akan dituangkan dalam LO agar menjadi lebih lengkap.

DJA menanyakan

Hanya konfirmasi saja terkait selisih PPN Reimbursement cukup signifikan, apakah ketentuan dalam pelaporan EITI apabila entitas tidak mengonfirmasi. Pertanyaannya dari data yang diterima apakah angka tersebut hanya untuk pembayaran selama 2016 atau hanya untuk pembayaran atas tagihan 2016 saja? Untuk mempersingkat saja ditambahkan penjelasan yaitu perusahaan hanya menyampaikn tagihan selama 2016 saja buka atas carry over tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2016.

Sebagai tambahan saja dalam sistem DJA apabila sudah dilakukan pembayaran atas PPN Reimbursement maka KKKS akan memberikan feedback bahwa dia telah menerima pembayaran senilai sekian.

Terkait rekomendasi mengenai kajian, apakah dapat diperjelas kajian apa yang harus kita lakukan pada tahun depan.

Terkait rekomendasi poin 8 rekonsiliasi saya ras kurang tepat, karena untuk rekonsiliasi PBB assume and discharge jika dilakukan rekonsiliasi atas aliran uang.

Terkait penjelasan atas ketidaksesuaian pada scooping study tidak perlu dijelaskan pada rekomendasi, lebih baik difokuskan pada narasi yaitu aliran uang

Tim IA menanggapi

Kebanyakan perusahaan atas selisih yang belum mengonfirmasi yaitu perusahaan hanya menyampaikan atas tagihan hanya pada 2016 saja. Selanjutnya akan diperbaiki penjelasannya.

Rekomendasi mengenai kajian lebih lanjut, sengaja dibuka agar dapat ditentukan isu mana saja yang akan dikaji lebih lanjut.

DJP menanggapi

Terkait penyampaian data PBB cukup lambat karena data tersebut bukan berada di direktorat PKP, tetapi hingga saat ini masih dipelajari lebih lanjut, kedepannya akan disampaikan apa saja hambatan dari penyampaian data PBB agar nantinya jika sudah disepakati untuk direkonsiliasi tidak terhambat kembali.

IPA menyampaikan

Ada tambahan yaitu contohnya Permen 51 pada hal 13 sudah dicabut, mohon konfirmasinya.

SKK menanggapi

- Semua usulan SKK sudah diakomodir oleh IA.
- Tambahan untuk tabel rekonsiliasi SKK dan KKKS diubah dari penerimaan negara menjadi jenis data
- Bantuan saran untuk Permen 52 yang akan ditambahkan agar dibuatkan tabel baru disamping tabel Permen 8/2017 untuk menunjukkan mana yang berubah dan mana yang tetap.

CSO menyampaikan

- Pada halaman 11 terkait data produksi dan penjualan minerba, mohon dikonfirmasi kembali terkait angka produksi minerba dan dimuat nilai produksi nasional tahun 2016 berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016.
- Mengenai BO (Beneficial Ownership) karena untuk pelaporan EITI ini dipublish apakah nantinya dilampirkan mengenai BO tersebut.

Tim IA menanggapi

Untuk meminimalisir misleading atas informasi, angka tersebut adalah berdasarkan angka perusahaan minerba yang telah menyampaikan laporan EITI sebanyak 80 perusahaan. Nantinya akan diberikan notes mengenai hal tersebut untuk menampung saran CSO.

Dirjen Perbendaharaan menyampaikan

Pada laporan rekonsiliasi hal. 99 tertulis bahwa rekonsiliasi atas PNBPNP minerba dilakukan antara perusahaan dan Ditjen minerba. Pertimbangannya atas rekonsiliasi ini apa? Karena semua data ada di Ditjen Perbendaharaan Negara.

Tim IA menanggapi

Berdasarkan hasil ratimlak pertama, tim IA sudah mengusulkan agar rekonsiliasi dilakukan dengan dirjen perbendaharaan, tetapi seiring waktu dirjen perbendaharaan menyatakan tidak dilakukan rekonsiliasi dengan dirjen perbendaharaan, karena dirjen perbendaharaan sifatnya hanya klarifikasi saja. Sehingga harus ada data baru dapat dikonfirmasi.

Commodity Trading

- Bpk Edi (Sekretariat EITI Indonesia) menyampaikan bahwa di tahun 2019 akan dilaksanakan penyusunan Laporan *Commodity Trading* tahap ke-2. Sekretariat EITI Internasional telah menyampaikan draft TOR dan sampai saat ini baru SKK Migas yang memberikan masukan.
- Bpk Robby (DJA), Laporan *Commodity Trading* tahap ke-2 bisa dilaksanakan tapi ekspektasi data yang dibuka sama dengan Laporan tahap ke-1.
- Bayu (SKK Migas): Setuju dengan penyusunan laporan *Commodity Trading*, namun data yang dibuka seperti dalam Laporan *Commodity Trading* ke-1.

D. Hasil Rapat

1. Tim Pelaksana EITI menyetujui final Laporan EITI 2016. Draft revisi final revisi diharapkan dapat dikirimkan pada 13 Desember 2018 agar mempercepat laporan dapat segera dicetak
2. Kajian lebih lanjut atas rekomendasi akan difokuskan dan dibahas lebih kepada daerah penghasil.
3. Tim Pelaksana EITI menyetujui penyusunan Laporan *Commodity Trading* tahap ke-2. Tingkat keterbukaan data akan sama dengan laporan tahap 1.